



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT

KEPUTUSAN

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT
NOMOR : KEP – 51 /M.2/Cr.3/05/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN
KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT TAHUN 2023

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT

- Menimbang : a. Bahwa salah satu syarat dalam pembangunan zona integritas menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) satuan kerja harus sudah melakukan penghitungan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) terhadap satuan kerjanya;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tentang Tim Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja Di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT TAHUN 2023.**
- KESATU : Menetapkan para Pejabat dan Pegawai yang nama - namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini Sebagai Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Tahun 2023.
- KEDUA : Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Tahun 2023 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
- 1. Melaksanakan verifikasi terhadap Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan bukti dukung hasil penilaian mandiri (*self assessment*) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri;
 - 2. Melaksanakan reviu terhadap hasil penilaian mandiri (*self assessment*) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri;
 - 3. Menyusun hasil/nilai akhir evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Tahun 2023.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Bandung
Pada Tanggal : 28 Mei 2024

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT



ADE T. SUTIAWARMAN
Jaksa Utama Madya NIP. 19680103 199003 1 008

Tembusan:

- 1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 3. Yth. Para Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI;
- 4. A r s i p.



Lampiran
Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
Nomor : KEP- 51 /M.2/Cr.3/05/2024
Tanggal : 28 Mei 2024

NO	NAMA, NIP, PANGKAT	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Ade T. Sutiawarman NIP. 19680103 199003 1 008 Jaksa Utama Madya (IV/d)	Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat	Ketua Tim Pengarah
2	Dr. Mia Banulita, SH.MH. NIP. 19760515 199603 2 002 Jaksa Utama Pratama (IV/b)	Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat	Wakil Ketua I
3	Dr. Mukhlis, SH. MH. NIP. 19690814 199503 1 001 Jaksa Utama Pratama (IV/b)	Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat	Wakil Ketua II
4	Gumilar Dawandi, SH, MH NIP. 19720317 200312 1 003 Sena Wira (III/d)	Kasubag Perencanaan Pada Bidang Pembinaan	Sekertaris I
5	Dr. Ema Siti Huzaemah Ahmad, SH, MH. NIP. 19800605 200212 2 002 Jaksa Madya (IV/a)	Pemeriksa Keuangan, Perlengkapan dan Proyek Pembangunan pada Bidang Pengawasan	Sekertaris II
6	M. Na'imullah, SH, MH. NIP. 19790702 200501 1 007 Jaksa Madya (IV/a)	Kasi TI dan Prosarin pada Bidang Intelijen	Anggota
7	Muh. Muslim Qudratullah, SH. MH.Li NIP. 19760305 200112 1 002 Jaksa Madya (IV/a)	Kasi Upaya Hukum Luar Biasa Eksekusi & Eksaminasi Pada Bidang Pidmil	Anggota
8	Demianus Eckhart Palapia, SH. MH. NIP. 19840623 200312 1 003 Jaksa Madya (IV/a)	Kasi Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan pada Bidang Intelijen	Anggota
9	HOESIN SLAMET HARTANTO, SH, MH. NIP. 19710103 199103 1 003 Jaksa Madya (IV/a)	Kasi TP Terorisme dan Lintas Pada Bidang Pidum	Anggota
10	Danny Mindamora, SH.MH NIP. 19781003 200212 1 002 Jaksa Madya (IV/a)	Kasi Pertimbangan Hukum Pada Bidang Datun	Anggota
11	Asep Mulyana, SH.M.Si. NIP. 19811003 200712 1 001 Jaksa Madya (IV/a)	Kasi Tata Usaha Negara Pada Bidang Datun	Anggota
12	Irvino Rangkuti, SH. MH. NIP. 19841129 200712 1 002 Jaksa Madya (IV/a)	Kasi Kamnegtibum pada Bidang Pidum	Anggota
13	Akhmad Erdiansyah P.H, SH. MH. NIP. 19810702 200312 1 002 Jaksa Madya (IV/a)	Kasi Penuntutan pada Bidang Pidmil	Anggota
14	Anton Laranono, SH. MH. NIP. 19790713 200501 1 010 Jaksa Madya (IV/a)	Kasi Penuntutan Pada Bidang Pidsus	Anggota
15	Singgih Kurniawan, SH. MH. NIP. 19820627 200603 1 001 Jaksa Madya (IV/a)	Kasi Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan Pada Bidang Intelijen	Anggota
16	Agustina Eka Saptarini, SH. MH. NIP. 19830817 200703 2 001 Jaksa Madya (IV/a)	Kasi Oharda pada Bidang Pidum	Anggota



NO	NAMA, NIP, PANGKAT	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
17	Heru Pujiono, SH. NIP. 19760128 200112 1 003 Jaksa Muda (III/d)	Kasi TP Narkotika dan Zat adiktif lainnya pada Bidang Pidum	Anggota
18	Guntur Wibowo, SH. MH. NIP. 19840503 200712 1 001 Jaksa Madya (IV/a)	Kasi Perdata pada Bidang Datun	Anggota
19	I Made Agus Sastrawan, S.H.,M.H. NIP. 19810529 200212 1 002 Jaksa Madya (IV/a)	Kasi Penyidikan pada Bidang Pidsus	Anggota
20	Iyus Zatnika, S.H. M.H. NIP. 19811109 200703 1 001 Jaksa Madya (IV/a)	Kasi Penindakan pada Bidang Pidmil	Anggota
21	Bobon Robiana, SH. NIP. 19760121 200003 1 002 Jaksa Madya (IV/a)	Kasi Pengamanan Pembangunan Strategis	Anggota
22	RIYANTO SETIADI, S.Kom,S.H.,M.H. NIP. 19790914 200212 1 004 Jaksa Madya (IV/a)	Kasi Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi	Anggota
23	NUR SRICAHYAWIJAYA, SH.MH. NIP. 19810224 200312 1 002 Jaksa Madya (IV/a)	Kasi Penerangan Hukum pada Bidang Intelijen	Anggota
24	Adri Eddyanto Pontoh, SH.MH. NIP. 19810105 200703 1 001 Jaksa Madya (IV/a)	Kasi Ekonomi dan Keuangan pada Bidang Intelijen	Anggota

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT



ADE T. SUTIAWARMAN
Jaksa Utama Madya NIP. 19680103 199003 1 008

